

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Komunitas Perempuan *Interfaith* Kalimantan Selatan

Komunitas Perempuan *Interfaith* (KPI) yang berlokasi di ibu kota Kalimantan Selatan merupakan sebuah wadah yang lahir dari proses panjang pemberdayaan perempuan antaragama. Terbentuknya komunitas ini berawal dari program Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) di tahun 2015 yang pada saat itu berfokus pada isu keadilan gender (*gender justice*) dan pemberdayaan perempuan. Di tahun 2015 kehadiran perempuan dalam keterlibatan kegiatan masih bersifat simbolik dan substansif, hal ini dikarenakan kuatnya budaya patriarki yang tidak terlepas di kalangan masyarakat dalam penempatan perempuan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya program yang secara khusus berfokus pada penguatan perempuan, terutama perempuan yang berada dalam kondisi rentan seperti perempuan *single parent*. Hal ini disampaikan oleh ketua komunitas yakni narasumber MA sebagai penanggung jawab pada saat itu:

“Orang-orang takut dengan janda nih, ruang kerja terbatas berdampak pada kemiskinan Perempuan, menafkahi diri sendiri aja kada kawa, apalagi menafkahi orang tua, Perempuan jadi miskin karena akses mendapatkan ekonomi dll terbatas. Jadi kenapa kita memilih penguatan gender *justice* ini memilih *single parent*, ada label yang sangat kuat, kekerasan dalam bentuk stereotip, pelabelan perempuan sebagai janda tadi, ouh kita interpsi. Oke kita akan menguatkan *single parent* ini supaya mereka menyadari posisi tidak setara dalam masyarakat ini.”¹

¹ MA, “Ketua KPI,” (UIN Antasari Banjarmasin), Wawancara Pribadi, 9 April 2026.

Perempuan *single parent* dipilih karena pelabelan yang sangat kuat berupa kekerasan secara verbal pada perempuan janda. Pelabelan verbal pada perempuan *single parent* ini mengakibatkan keterbatasan akses di ruang lingkup ekonomi. Oleh sebab itu LK3 kemudian menginterpretasikan isu tersebut, dengan menguatkan perempuan *single parent* agar mereka memiliki kesadaran bahwa adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun karena isu kesetaraan ini tidak hanya ada di dalam Islam saja, dan LK3 yang berbasis antaragama yang dalam programnya melibatkan keberagaman. Maka dikumpulkanlah perempuan-perempuan *single parent* dari berbagai antaragama dalam satu program, agar menguatkan kesadaran dan membantu posisi mereka di kalangan masyarakat.

Program ini disepakati dengan nama Pelangi sebagai wadah perempuan antaragama, pelangi di ambil karena memiliki filosofis makna yang melambangkan keberagaman dan harapan setelah kesulitan. Dari pertemuan-pertemuan sederhana dan dialog, muncul-lah kesadaran bersama tentang pentingnya peran perempuan dalam keberagaman. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu pengurus, yakni narasumber MN selaku sekretaris KPI:

“Awal Pelangi ini adalah di tahun 2015. Program LK3 yang intensif berbasis *gender justice*. Perempuan antaragama Kalimantan Selatan mulai saling berjumpa, dari percakapan sederhana, kemudian beraneka ragam keadilan, berbagai ruang dialog.”²

Komunitas Pelangi berfungsi sebagai wadah belajar, bertemu, dan berkolaborasi antarperempuan antaragama melalui kegiatan sosial, refleksi bersama, dan pelatihan keterampilan (membuat kain sasirangan, gantungan kunci,

² MN, “Sekretaris KPI,” (Rumah Sekretaris KPI), Wawancara Pribadi, 18 Februari 2026.

dll.). Namun, nama "Pelangi" kemudian diubah karena pada tahun 2022 mulai muncul isu yang mengaitkan nama tersebut dengan unsur LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Setelah melalui perdebatan di antara berbagai tokoh komunitas, termasuk para pengurus saat itu, nama Pelangi resmi diubah menjadi KPI Kalimantan Selatan.

Keputusan dalam rapat ini diambil untuk menciptakan ruang yang lebih aman dan luas tanpa stigma negatif. Hingga kini, nama KPI tetap digunakan dalam rangkaian acara komunitas, sebagai bagian dari komunitas berbasis gender dan perempuan antaragama di Banjarmasin. Hal ini sebagaimana di katakan narasumber MN: “Karena kata orang, ketika kita kenalan 'Pelangi' itu aja udah kepikirannya ke sana, komunitas itu ya LGBT. Akhirnya dirubahlah menjadi nama KPI Kalimantan Selatan.”³ Perubahan nama dari “Pelangi” menjadi KPI menunjukkan adanya proses negosiasi identitas yang dilakukan komunitas terhadap konteks sosial masyarakat. Stigma yang melekat pada istilah “Pelangi” mencerminkan kuatnya konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan nama ini dapat dipahami sebagai strategi adaptif untuk menjaga keberlanjutan komunitas sekaligus memperluas penerimaan publik terhadap gerakan perempuan antaragama.

Tujuan berdirinya komunitas sendiri mulai meluas seiring waktu, namun tetap menjadi wadah perempuan antaragama dalam membangun harmoni dan toleransi antarumat beragama berbasis *justice gender*. Bermula dari program LK3 dengan tujuan awal sebagaimana sesuai hasil wawancara narasumber AB sebagai salah satu anggota lama dan perwakilan Protestan dari KPI:

³ MN, “Sekretaris KPI.”

“Dulu tuh sebenarnya memberdayakan ibu-ibu *single parent*, ada pang upaya-upaya pernah jua dulu bikin warung-warung ruko dulu untuk mendapatkan *income*. ”⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa fokus awal komunitas lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya bagi ibu tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa isu ekonomi menjadi pintu masuk dalam membangun kesadaran kolektif perempuan antaragama. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjadi strategi awal untuk memperkuat solidaritas dan kepercayaan antaranggota komunitas yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Selanjutnya pada saat nama komunitas ini di ubah menjadi Pelangi, tujuannya meluas menjadi wadah belajar, bertemu dan berkolaborasi dengan antaragama melalui kegiatan sosial, refleksi bersama dan pelatihan. Setelah perubahan nama komunitas menjadi KPI, tujuan kegiatannya menjadi lebih intensif. Tidak hanya membicarakan tentang perempuan, tetapi juga mencakup semua aspek sesuai dengan ruang lingkup programnya. Perkembangan tujuan komunitas dari sekadar pemberdayaan ekonomi menuju isu keadilan gender dan perdamaian menunjukkan adanya transformasi orientasi gerakan. Hal ini mengindikasikan bahwa komunitas tidak hanya bergerak pada level praktis, tetapi juga mulai memasuki ranah advokasi dan kesadaran kritis perempuan dalam ruang publik. Adapun ruang lingkup kegiatan komunitas terdiri atas:

1. Kajian dan riset

⁴ AB, “Anggota KPI beragama Protestan,” (STT Banjarmasin), Wawancara Pribadi, 27 Februari 2026.

2. Penguatan wacana
3. Penguatan ekonomi
4. Pengaduan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender
5. Publikasi dan dokumentasi

Visi komunitas ini adalah “kepeloporan perempuan *interfaith* di ruang publik”, adapun misinya yakni:

1. Melakukan kajian ilmiah isu perempuan *interfaith* (isu keadilan gender) perdamaian dan demokrasi
2. Memperkuat kesadaran kritis perempuan *interfaith* terhadap isu keadilan dan perdamaian
3. Mendorong partisipasi aktif perempuan *interfaith* dalam berbagai peran di ruang publik
4. Mempublikasikan isu keadilan gender dan perdamaian

Secara struktur organisasi, KPI memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua Ibu MA, sekretaris Ibu MN, bendahara Ibu LA. Keanggotaan KPI terdiri dari perempuan-perempuan antaragama, yakni Islam sebanyak 50 orang, Katolik 20 orang, Protestan 20 orang, Hindu 20 orang, dan 20 orang beragama Buddha. Keanggotaan ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang dimaksudkan adalah adanya beberapa perempuan yang tinggal di kota berbeda di luar wilayah Banjarmasin seperti Pelaihari, Tanah Bumbu, dll. Keanggotaan yang tersebar hingga ke berbagai wilayah menunjukkan bahwa KPI tidak hanya menjadi fenomena lokal di Banjarmasin, melainkan sebuah simpul gerakan perempuan antaragama di Kalimantan Selatan

Adapun program dan kegiatan komunitas pada tahap awal dimulai pada tahun pertama ketika masih berada dalam naungan program Pelangi LK3. Pada fase ini, aktivitas difokuskan pada pendataan perempuan-perempuan yang dilibatkan dalam program, sebagai langkah awal pemetaan partisipan sekaligus penguatan basis komunitas. Selain itu, anggota juga mengikuti proses belajar bersama melalui diskusi rutin yang membahas berbagai isu, seperti keberagaman, perdamaian, dan keadilan gender, yang dilaksanakan di berbagai tempat ibadah. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan anggota, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan dan kedekatan lintas agama melalui ruang-ruang dialog yang inklusif.

Memasuki tahun kedua, program mengalami pengembangan dengan memfokuskan pada penguatan ekonomi. Salah satu kegiatan utama pada tahap ini adalah pelatihan dan produksi kain sasingan yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggota, sekaligus memperkuat solidaritas melalui kerja kolektif. Namun, setelah komunitas tidak lagi berada dalam naungan program LK3, kegiatan pembuatan sasingan tidak lagi menjadi program utama sebagaimana sebelumnya.

Meskipun demikian, semangat pemberdayaan ekonomi tetap berlanjut dalam bentuk kegiatan lain yang lebih fleksibel dan kontekstual, seperti pembuatan berbagai kerajinan tangan, termasuk gantungan kunci dan produk kreatif lainnya. Aktivitas ini menunjukkan adanya adaptasi komunitas dalam mempertahankan keberlanjutan program ekonomi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota.

Secara keseluruhan, KPI Kalimantan Selatan memperlihatkan perkembangan sebagai ruang kolektif perempuan antaragama yang tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kesadaran kritis, advokasi keadilan gender, serta upaya membangun dan merawat harmoni antaragama di tengah masyarakat yang majemuk.

2. Gambaran Peran Perempuan pada Komunitas Perempuan *Interfaith* dalam Membangun Harmoni Antaragama di Banjarmasin.

KPI pada dasarnya adalah tempat atau sarana bagi masyarakat perempuan untuk menyalurkan hak-hak suara tentang isu perempuan dan keagamaan dengan berbagai cara, dengan begitu KPI merupakan ruang bagi perempuan-perempuan antaragama bertemu, mereka tidak hanya berasal dari berbagai agama yang berbeda namun antaragama maupun budaya dan suku mereka berasal. KPI juga aktif melakukan berbagai kegiatan yang secara langsung berdampak yang pada terciptanya harmoni di Banjarmasin, dengan membangun relasi pada tokoh antaragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah (kepolisian, dinas sosial), lembaga nasional (Komisi Nasional Perempuan, yayasan), masyarakat sekitar sekretariat, serta publik Banjarmasin secara umum. Berikut adalah kegiatan-kegiatan KPI yang berkontribusi pada harmoni antaragama di Banjarmasin

a. Seminar dan Webinar

Dalam mengkaji suatu isu KPI aktif dalam mengadakan kegiatan diskusi berupa seminar maupun webinar, dengan tujuan penguatan wacana terhadap gender *justice* dan isu-isu nasional. Bentuk utamanya yakni “belajar bersama” yang

dilakukan secara rutin di tempat ibadah atau tempat lainnya yang berbeda, dengan waktu tergantung pada hari penting-penting agama atau secara online melalui media sosial.

Awalnya ruang lingkup kegiatan membahas tentang isu perempuan, seperti yang dikatakan narasumber MA "kita harus belajar seperti ini jadi belajar Bersama rutin, terkait isu Perempuan supaya ada persoalan di masyarakat kita."⁵ Isu Perempuan di angkat lebih dulu agar perempuan-perempuan di dalam komunitas menyadari adanya persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Kemudian isu yang dibahas mulai bertransformasi seiring waktu, dari isu perempuan berkembang sesuai kebutuhan dalam penguatan wacana seperti keadilan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun isu kebangsaan.

Narasumber MN juga menambahkan perempuan dalam kegiatan ini: "Mengadakan diskusi bulanan, pelatihan-pelatihan dan edukasi pencegahan ekstremisme untuk ibu-ibu dan anak-anak muda."⁶ Narasumber HW menambahkan tentang isu yang dibahas: "Kami tidak bicara menurut agama masing-masing tapi banyak hal misalnya kekerasan pada Perempuan dan anak, dilihat dari perspektif pandangan agama."⁷

Kegiatan seminar dan webinar ini menempatkan perempuan sebagai peserta, pelaksana jalannya acara, fasilitator, jembatan dengan tokoh, dan menjadi narasumber atau pembicara ketika acara berlangsung. Dalam pelaksana jalannya acara perempuan tidak hanya sebatas peserta tetapi ditempatkan secara aktif sebagai

⁵ MA, "Ketua KPI."

⁶ MN, "Sekretaris KPI."

⁷ HW, "Anggota KPI beragama Katolik," (Sekretariat KPI), Wawancara Pribadi, 28 Februari 2026.

aktor penyelenggara seperti panitia, MC, moderator, notulensi, dan operator yang menjalankan acara.

Tidak hanya sebagai aktor yang menjalankan acara, perempuan juga memberikan fasilitas berupa alat dan tempat acara. Contohnya narasumber AB mengungkapkan “misalnya imlek minta tolong di STT (Sekolah Tinggi Teologi), kalau nyewa itu kan berapa, aula itu tuh kemudahannya”⁸, Narasumber SRT perwakilan Buddha juga memberikan pernyataan “Iya sering kami mengadakan kegiatan bersama, di aula tempat ibadah (vihara, gereja).”⁹ Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu MA “Perempuan-perempuan tadi kegiatan belajar bersama. Intensif lah berganti-ganti tempat kaya tempat ibadah.”¹⁰

Sebagai fasilitator perempuan memberikan kesempatan sebagai penyedia fasilitas tempat ibadah dengan membangun relasi ke para tokoh agama, untuk mendapatkan akses ke tempat ibadah tentunya perlu mendapatkan izin dari pengurus tempat ibadah maupun tokoh agama. Inilah yang menempatkan perempuan sebagai penghubung atau jembatan untuk membangun relasi ke lembaga maupun tokoh agama.

Menjadikan kombinasi peran perempuan terlihat kompleks, akan tetapi inilah yang menjadikannya keunggulan dalam membangun harmoni antaragama yang berakar dan sehat. Dengan menempatkan perempuan sebagai aktor belakang dan depan acara, secara langsung memberikan perempuan menjadi penghubung ke

⁸ AB, “Anggota KPI beragama Protestan.”

⁹ SRT, “Anggota KPI beragama Buddha,” (Media Sosial), Wawancara Pribadi, 16 April 2026.

¹⁰ MA, “Ketua KPI.”

lembaga dan tokoh agama. Kesempatan tersebut memberikan peran perempuan di ruang publik. Harmoni inilah yang terlihat, mereka memberikan penguatan wacana di sisi lain membangun relasi ke lembaga dan tokoh agama.

b. Dialog Publik

Berawal dari kegiatan-kegiatan program yang telah dijalankan hingga pertemuan-pertemuan sederhana di luar dan dalam kegiatan. KPI memberikan kesempatan ruang dialog dan interaksi pada anggota maupun non-anggota. Dalam setiap rangkaian kegiatan perempuan secara aktif mengutarakan pendapat dan pemikiran mereka, tanpa takut dihakimi. Sebagai ketua, MA secara aktif menyuarakan pendapat dan mendorong para anggota untuk mengemukakan pemikiran mereka. Sikap saling terbuka dan mendorong untuk berani yang membuat setiap anggota, merasa diberi kesempatan dan diterima tanpa memandang latar belakang mereka.

Dalam hal ini selama proses terjadinya peran perempuan sebagai fasilitator dialog, mereka menciptakan ruang aman untuk diskusi antaragama dengan yakni menguatkan kesadaran kritis. narasumber MN Sebagai perwakilan Islam menjelaskan: “Membangun dialog & toleransi, Jadi jembatan komunikasi antar pemeluk agama. Perempuan sering dianggap lebih luwes dan empatik, jadi efektif meredakan konflik berbasis agama di tingkat akar rumput.”¹¹ Narasumber AT juga menambahkan:

“Perempuan untuk membina kerukunan, justru disitu adanya. Karena di Perempuan, walaupun mungkin urusan dandan, baju kita masih bersaing tapi Ketika kita bisa jadi persaudaraan hal seperti itu tidak pikir dulu. Kita bisa

¹¹ MN, “Anggota KPI beragama Islam,” (Media Sosial), Wawancara Pribadi, 24 April 2026.

benar benar bisa jadi pencetus perdamaian itu sendiri entah bagaimana caranya yang itu sulit dilakukan oleh pria biasanya. Karena pria punya dasar punya kompetisi satu sama lain. Disini malah ramai-ramai, yuk belanja, dari ada belanja dari warung, kita belanja di Kios KPI.”¹²

Berdasarkan wawancara keduanya, perempuan sebagai fasilitator dialog antaragama mampu menjembatani komunikasi yang bersifat lebih luwes dan empatik, selain itu menjadi penengah yang efektif dalam meredakan konflik agama, terutama di tingkat akar rumput. Pendapat rasional yang unik menunjukkan perbedaan terhadap pola kompetisi yang sering muncul pada pria, di sisi lain perempuan cenderung mengutamakan persaudaraan dan kolaborasi.

Narasumber MN sebagai perwakilan agama Islam menceritakan pengalaman beliau: “Kita bertukar pikiran berbagi ilmu tentang komunitas masing, jadi itu terpatahkan negatifnya, ouh Syiah seperti ini ternyata bu sama dengan Islam yang lain itu sholat, puasa sama. Setelah kita duduk bersama, bagaimana kita menjelaskan bahwa Ahmadiyah dari Islam. Nah baru mereka paham.”¹³

Melalui kegiatan terbuka, perempuan sebagai aktor dialog tidak hanya terjalin di antara anggota, mereka dengan bekal yang di bawa oleh belajar bersama mampu membagikannya kepada keluarga dan masyarakat. Perempuan sebagai fasilitator dialog mampu menjembatani dialog antaragama, sekaligus mengurangi prasangka sesama anggota.

c. Kunjungan tempat ibadah

Selain aktif dalam kegiatan seminar-webinar dan dialog dalam rangkaian acara, KPI juga aktif mengunjungi tempat ibadah khususnya di Banjarmasin. KPI

¹² AT, “Anggota KPI beragama Protestan,” (Sekretariat KPI), Wawancara Pribadi, 23 Februari 2026.

¹³ MN, “Anggota KPI beragama Islam.”

mengajak para anggota mengunjungi tempat ibadah untuk menguatkan toleransi dan mengenalkan agama mereka ke antar anggota dan dengan memanfaatkan keberagaman antaragama. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber MA “Yah intensif lah berganti-ganti tempat kaya tempat ibadah, tahun pertama selain pendataan lalu belajar bersama di tempat-tempat ibadah gentian nah.”¹⁴ lalu narasumber NKW menambahkan pernyataan

“Berdasarkan pengalaman saya selama di KPI, yang saya lihat dalam membangun hubungan dengan tokoh agama lain sangat baik bisa dilihat dalam setiap kegiatan KPI kita selalu mengadakannya di berbagai tempat ibadah secara bergantian, baik di sekretariat muslim, gereja , vihara dan pura jadi bisa dilihat dari situ kalau memang hubungan dengan tokoh agama lain terjalin baik.”¹⁵

Berdasarkan pernyataan narasumber NKW kegiatan kunjungan tempat ibadah tidak hanya membangun relasi dengan pengurus dan tokoh agama dan semata-mata kunjungan biasa untuk silaturahmi saja, akan tetapi diiringi dengan belajar bersama yang kemudian isi dengan diskusi dialog, dan refleksi bersama. Diskusi dialog yang pernah dilakukan di tempat ibadah adalah, di tahun 2025 salah satunya “Diskusi Publik, Harmoni Agama dan Alam: Pengalaman Perempuan dan Antaragama di Banjarmasin” yang dilaksanakan di Klenteng Soetji Nurani. Secara refleksi dalam kunjungan tempat ibadah yakni “Undangan Perayaan Bersama Hari Besar Agama & Refleksi Memaknai Nyepi, Idul Fitri dan Paskah dengan tema: Menyemai Damai dan Kasih dalam Keberagaman” acara dilaksanakan di Aula Vihara Dhammasoka dengan banyak mengundang para tokoh agama di Banjarmasin sebagai narasumber.

¹⁴ MA, “Ketua KPI.”

¹⁵ NKW, “Anggota KPI beragama Hindu,” Wawancara Pribadi, 25 Maret 2026.

d. Aksi Sosial dan Kemanusiaan

KPI pernah melakukan aksi sosial dalam kegiatannya yang berdampak pada masyarakat. Berbeda dengan kegiatan seperti dialog publik dan seminar yang bertujuan untuk edukasi dan penguatan wacana, aksi sosial bersifat langsung dan turun ke masyarakat. Kegiatan ini melibatkan para anggota KPI dengan latar belakang agama berbeda terlibat melakukan aksi sosial berbasis kemanusiaan, dan untuk waktu pelaksanaan tergantung pada hari-hari tertentu seperti hari besar-besar agama atau hari peringatan lainnya. Inilah yang membuat aksi sosial menjadi instrumen citra positif KPI di mata publik Banjarmasin.

Aksi sosial yang pernah dilakukan oleh KPI seperti membagi brosur perdamaian di hari toleransi, mengumpulkan sembako untuk korban banjir, membagikan takjil ke rumah sakit saat Ramadan, bakti sosial, kegiatan-kegiatan bulanan bergiliran ke rumah ibadah agama, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contohnya adalah ketika hari toleransi di tahun 2019 di acara *Car Free Day*, mereka melakukan aksi sosial dengan membagikan brosur perdamaian, setiap agama dan aliran membagikan brosur mereka di jalan. Narasumber MN menjelaskan kegiatan ini:

“Seperti pernah ketika melakukan aksi di luar, di Sabilal waktu itu di Desember 2019, Kalau tidak salah ingat ya, hari toleransi eh apa yah, ibu lupa hari apa itu ya, kita bagi bagi kan masing-masing komunikasi masing-masing agama, bawa masing-masing untuk di bagikan *Car Free Day* itu ya.”¹⁶

Narasumber AB sebagai anggota Protestan KPI menggambarkan keterlibatan KPI dalam aksi sosial dengan sederhana namun bermakna: "Kalau semalam musim

¹⁶ MN, “Sekretaris KPI.”

banjir kalau ada musibah kita saling bagi sembako.”¹⁷ Pernyataan singkat beliau menunjukkan bahwa aksi sosial sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang otomatis dilakukan ketika musibah terjadi, bukan kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari untuk kepentingan citra.

Aksi sosial ini menunjukkan adanya dorongan tiap antaragama untuk bergerak membagikan makna harmoni pada masyarakat, dengan membagikan brosur secara langsung mereka tidak hanya menunjukkan identitas mereka sebagai perempuan-perempuan antaragama yang bersatu pada publik tetapi juga mempromosikan perdamaian dan kerukunan sebagai advokasi perdamaian untuk mencapai harmoni.

Dengan keterlibatan langsung perempuan dalam berbagai kegiatan sosial, KPI menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran nyata dalam mempromosikan perdamaian serta memberikan bantuan saat terjadi musibah. Partisipasi ini turut berkontribusi pada berkurangnya prasangka dan stigma di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam aksi sosial yang konkret, sehingga mampu memperkuat harmoni antaragama.

e. Kios KPI

Selain kegiatan formal seperti dialog publik, seminar rutin, dan aksi sosial di ruang terbuka, KPI juga mengembangkan ruang-ruang kegiatan yang bersifat informal, cair, dan berakar pada praktik ekonomi keseharian. Salah satu ruang tersebut dikenal oleh para anggota sebagai “Kios KPI”. Berdasarkan hasil

¹⁷ AB, “Anggota KPI beragama Protestan.”

wawancara, warung ini tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi jual beli semata, melainkan telah bertransformasi menjadi simpul harmoni sosial yang melibatkan tidak hanya anggota KPI, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

Kios KPI merupakan salah satu program yang lahir dari ruang lingkup kegiatan komunitas, yang berangkat dari tujuan awal pendirian KPI, yakni pemberdayaan ekonomi perempuan. Inisiatif ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi anggota, tetapi juga sebagai strategi membangun ruang interaksi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Berlokasi di Jalan Pekapuran Raya, tepatnya di rumah salah satu anggota, Kios KPI berfungsi sebagai markas sekaligus pusat aktivitas komunitas. Tempat ini secara rutin digunakan sebagai lokasi pertemuan bulanan, diskusi santai, serta berbagai kegiatan internal maupun terbuka. Dalam praktiknya, suasana warung yang cair dan nonformal memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih egaliter di antara anggota, sehingga memperkuat relasi interpersonal lintas latar belakang agama dan sosial.

Kios KPI tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga menjadi medium yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan interaksi sosial. Letaknya yang strategis dan mudah diakses menjadikan warung ini dikenal tidak hanya oleh anggota komunitas, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Kondisi tersebut memungkinkan Kios KPI berperan sebagai ruang terbuka yang inklusif, di mana masyarakat dapat datang, berinteraksi, serta terlibat dalam berbagai aktivitas yang berlangsung.

Interaksi yang terjadi di dalamnya melibatkan tidak hanya anggota komunitas, tetapi juga masyarakat sekitar sebagai pembeli, mitra, maupun pengunjung. Keberadaan warung di kawasan yang padat dan aktif turut memperkuat fungsinya sebagai ruang pertemuan yang mempertemukan individu dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, Kios KPI tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang memperluas jejaring, memungkinkan pertukaran pengalaman, serta mempertemukan beragam latar belakang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota beragama Katolik yakni narasumber AT memaparkan tentang Kios KPI ini:

“Perempuan untuk membina kerukunan, justru disitu adanya. Karena di Perempuan, walaupun mungkin urusan dandan, baju kita masih bersaing, tapi ketika kita bisa jadi persaudaraan, hal seperti itu tidak dipikir dulu. Kita bisa benar-benar bisa jadi pencetus perdamaian itu sendiri entah bagaimana caranya, yang itu sulit dilakukan oleh pria biasanya. Karena pria punya dasar punya kompetisi satu sama lain. Disini malah ramai-ramai, yuk belanja, dari ada belanja dari warung, kita belanja di Kios KPI.”¹⁸

Dalam konteks Kios KPI, interaksi yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam membentuk persepsi masyarakat. Ketika warga sekitar menyaksikan secara langsung bahwa perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta kelompok keagamaan seperti Syiah dan Ahmadiyah dapat berbelanja bersama, bercengkerama, dan saling membantu dalam satu ruang yang sama, maka pengalaman tersebut secara perlahan berkontribusi pada pengurangan prasangka dan stereotip negatif antar kelompok.

¹⁸ AT, “Anggota KPI beragama Protestan.”

Dengan demikian, kios KPI tidak sekadar berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi, melainkan berkembang menjadi ruang pembelajaran sosial yang bersifat praktis dan kontekstual. Ia dapat dipahami sebagai semacam “laboratorium sosial terbuka”, di mana nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan harmoni tidak hanya didiskusikan secara teoritis, tetapi dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi yang berulang dan terbuka, warung ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan sosial serta memperkuat kohesi masyarakat di tengah keberagaman.

3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Perempuan dalam Komunitas Perempuan *Interfaith* (KPI) untuk Membangun Harmoni Antaragama di Banjarmasin.

a. Faktor Pendukung Peran Perempuan dalam KPI untuk Membangun Harmoni Antaragama di Banjarmasin.

1) Keberagaman Latar Belakang anggota

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, KPI menghimpun perempuan dari berbagai latar belakang keagamaan dalam satu wadah bersama. Anggota komunitas ini berasal dari beragam agama, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Selain itu, terdapat pula anggota dari kelompok atau aliran dalam Islam, seperti Ahmadiyah dan Syiah, yang semakin memperkaya spektrum keberagaman di dalam komunitas. Keberagaman ini menjadi kunci pertama yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat solidaritas antaranggota.

Narasumber MN, yang berasal dari komunitas Ahmadiyah sekaligus sebagai sekretaris KPI, menggambarkan pengalamannya sebagai berikut: “Di Pelangi itu merasa tidak asing, tidak seperti orang yang minoritas. Semuanya berbagi, berbaur,

yang muslim, yang Hindu, Kristen, Katolik, Buddha. Itu luar biasa.”¹⁹ Narasumber AT perwakilan agama Protestan juga menambahkan “senang ai, banyak kawan, beragam macam-macam”²⁰

Kehadiran berbagai agama dan aliran dalam satu ruang yang sama menciptakan dinamika pembelajaran sosial yang khas. Alih-alih melahirkan kecurigaan, keberagaman tersebut justru mendorong terjadinya pertukaran pemahaman terkait ajaran dan praktik keagamaan masing-masing. Proses ini berlangsung melalui dialog informal maupun diskusi terstruktur dalam berbagai kegiatan komunitas. Ketua KPI narasumber MA, menjelaskan bahwa keberagaman tersebut dikelola secara produktif melalui ruang dialog yang terbuka:

“Kita duduk bersama, berbagi pengalaman. Ahmadiyah menjelaskan Ahmadiyah itu apa, Syiah menjelaskan Syiah itu apa. Ternyata sholatnya sama, puasanya sama. Hanya beda pemahaman, beda cara pandang. Jadi orang jadi paham, tidak salah persepsi lagi.”²¹

Selain keberagaman dalam aspek keagamaan, KPI juga diwarnai oleh variasi latar belakang sosial-ekonomi anggotanya. Anggota komunitas berasal dari beragam profesi, seperti dosen, guru, ibu rumah tangga, aktivis organisasi, hingga pelaku usaha kecil. Keberagaman ini menjadi kekuatan tersendiri karena setiap individu membawa pengalaman, pengetahuan, serta jaringan sosial yang berbeda, yang kemudian berkontribusi terhadap dinamika dan keberlanjutan kegiatan komunitas.

¹⁹ MN, “Sekretaris KPI.”

²⁰ AT, “Anggota KPI beragama Protestan.”

²¹ MA, “Ketua KPI.”

Keberagaman antaragama dalam KPI menghadirkan ruang pertemuan antarindividu dengan identitas keagamaan yang berbeda. Ruang pertemuan ini menjadi sarana strategis dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan masing-masing. Melalui interaksi yang intens dan berkelanjutan, anggota komunitas secara bertahap mengalami proses pengurangan prasangka dan dekonstruksi stereotip terhadap kelompok lain. Dengan demikian, keberagaman tidak lagi dipandang sebagai potensi konflik, melainkan sebagai media pembelajaran sosial yang memperkaya perspektif individu. Hal tersebut juga ditegaskan oleh narasumber MN:

“Setelah duduk bersama dalam kegiatan di rumah ibadah, tujuannya supaya timbul pemahaman yang luas tentang keberagaman. Kita saling mengenal satu sama lain. Seiring berjalan waktu, sering duduk bersama dan berdialog tentang agama, akhirnya tumbuh rasa saling sayang. Tidak canggung lagi.”²²

Keberagaman latar belakang dalam KPI tidak hanya menjadi ciri khas komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi penting dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat relasi antaragama di tingkat lokal. Keberagaman menjadi fungsi sebagai kondisi awal yang memungkinkan terjadinya relasi antaragama yang otentik, namun dalam konteks KPI keberagaman tidak hanya menjadi fondasi utama melainkan di iringi dengan relasi yang telah dipelihara dan dibangun secara aktif sebagai anggota.

2) Relasi perekat Harmoni

Pada dasarnya, KPI KPI merupakan komunitas mandiri yang terbentuk setelah tidak lagi berada dalam naungan program LK3. Kondisi tersebut

²² MN, “Sekretaris KPI.”

menjadikan KPI sebagai komunitas swadaya yang tidak bergantung pada lembaga tertentu serta dijalankan atas dasar kesukarelawanan anggotanya. Dalam menjalankan program, aspek pendanaan, sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan sepenuhnya diupayakan secara kolektif oleh anggota komunitas.

Narasumber MA menjelaskan bahwa dalam kondisi swadaya tersebut, setiap anggota didorong untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing: “Kalau membahas uang, kita harus memikirkan bersama. Siapa punya keahlian apa, kita buat proposal, karena kita swadaya. Ada materi, relasi, dan lain-lain itu dari konsen visi kita tadi.”²³

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber MN yang menegaskan bahwa kegiatan komunitas tidak bergantung pada dukungan dana besar dari pemerintah maupun lembaga tertentu, melainkan berasal dari kontribusi bersama anggota: “Kita tidak didukung dana besar dari pemerintah atau satu komunitas saja, tapi sama-sama. Anggaran program selama ini swadaya.”²⁴

Sebagai komunitas swadaya, KPI memanfaatkan keberagaman latar belakang anggotanya sebagai kekuatan utama, khususnya dalam membangun relasi dan jaringan. Relasi ini menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program tanpa harus bergantung pada sumber daya finansial yang besar. Narasumber AB yang menyebutkan bahwa kekuatan jaringan sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan, terutama untuk kegiatan berskala besar: “Modal jaringan yang

²³ MA, “Ketua KPI.”

²⁴ MN, “Sekretaris KPI.”

mempermudah, jadi tidak banyak mengeluarkan biaya. Kalau event besar, mengandalkan jaringan.”²⁵

Relasi yang dibangun dalam komunitas kemudian berkembang menjadi jejaring yang lebih luas dengan pihak eksternal. KPI tidak bergerak secara individual, melainkan menjalin hubungan strategis dengan berbagai aktor, seperti tokoh agama, instansi pemerintah, serta lembaga sosial lainnya. Jaringan ini berfungsi sebagai sarana dukungan, kolaborasi, sekaligus ruang berbagi sumber daya dan pengetahuan.

Narasumber AB menjelaskan bahwa jejaring ini tidak hanya berfungsi secara praktis dalam mendukung program, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, seperti saling membantu kelompok rentan, membuka akses pembelajaran, serta memperkuat solidaritas antaragama:

“Memang mengandalkan jaringan, non profit sebagai wadah untuk mengingatkan saling berbagi, misalnya Ahmadiyah itu kan termasuk orang yang terintimidasi, mereka kan sangat terbantu karena jaringan-jaringan itu, nanti ibu MA yang menghubungkan. Tapi senangnya tidak ada batas biar kami beda agama, bekawanan, ibu F yang berpendidikan meluang waktu, sebenarnya KPI ini bejejaring lah dengan hal yang di rasa penting juga.”²⁶

KPI sebagai wadah non-profit berperan sebagai ruang untuk saling mengingatkan, berbagi relasi, dan memperkuat solidaritas antaranggota. Komunitas ini juga memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, untuk membangun relasi sosial yang lebih luas. Selain itu, KPI turut menghubungkan anggota dengan tokoh agama, pemerintah, serta berbagai bidang

²⁵ AB, “Anggota KPI beragama Protestan.”

²⁶ AB, “Anggota KPI beragama Protestan.”

pemberdayaan guna mendukung penguatan kapasitas dan keterlibatan sosial perempuan antaragama.

Dengan demikian, relasi dalam KPI tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional komunitas, tetapi juga sebagai perekat sosial yang memperkuat harmoni antaranggota dan antar kelompok. Relasi yang dibangun secara inklusif dan kolaboratif mampu menciptakan ruang kepercayaan, solidaritas, serta saling ketergantungan positif. Pada akhirnya, jejaring yang terbentuk menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan komunitas sekaligus memperluas dampaknya dalam membangun harmoni antaragama di masyarakat.

b. Faktor Tantangan dan Hambatan Peran Perempuan dalam Komunitas Perempuan *Interfaith* untuk Membangun Harmoni Antaragama di Banjarmasin.

1) Peran ganda

Sebagai wadah antaragama yang beragam, menyatukan persepsi antar anggota adalah tantangan berkelanjutan. Setiap anggota membawa latar belakang teologis dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan ungkapan narasumber MA:

“Komunitas itu kesini tidak mudah berat, belum lagi sampai bercampur. Lalu mendekatkan isu apa, *kada* semua isu Perempuan, kalau salma melihat ibu-ibu sekarang. Jadi tidak seberagam masuknya, tidak sama perspektif, ada yang pemula ada yang sudah di atas lagi, nah itu sudah keberagaman pemikiran keberagaman belajar pengalaman, itu sudah isu Perempuan, belum lagi isu di luar. Panjang ibu-ibu nih punya perhatian terhadap isu-isu publik, lingkungan, soal sampah, isu HAM (Hak Asasi Manusia).”²⁷

²⁷ MA, “Ketua KPI.”

Berdasarkan penjelasan narasumber dapat dilihat bahwa menarik anggota dari berbagai antaragama tidaklah mudah, dengan berbagai latar belakang agama, pekerjaan, budaya, bahkan pengalaman hidup masing-masing yang di bawa oleh anggota mempengaruhi pola pikir dan perspektif yang beragam. KPI kemudian menyesuaikan kembali tidak hanya membahas isu gender dan agama namun juga isu yang di bahas terhadap dari isu publik, lingkungan, soalisasi sampah, hingga isu HAM.

Terkadang ego atau perbedaan cara pandang terhadap suatu isu sensitif dapat memicu riak kecil di dalam organisasi. Mengingat anggotanya adalah perempuan, peran domestik sebagai ibu rumah tangga atau pekerja seringkali berbenturan dengan agenda komunitas. Solidaritas terkadang teruji ketika anggota harus memilih antara komitmen organisasi atau tanggung jawab keluarga, yang menyebabkan partisipasi anggota bersifat pasang-surut

2) Dampak swadaya terhadap manajemen dalam komunitas

Setelah lepas dari program LK3, KPI kemudian menjadi komunitas yang berdiri sendiri tanpa dukungan lembaga tertentu yang berarti berbasis swadaya. Sebagaimana yang di ungkapkan narasumber MA "Lalu ibu bagaimana kita luaskan Ganti jadi komunitas *interfaith*, tapi LK3 tidak menjadi sebuah program lagi. Tapi kita punya konsen yang lain, ini selesai disini. Lalu kemudian ibu ada tanggung jawab program ditinggalkan nanti buyar, makanya ibu tetap lanjutkan dikawal dengan swadaya."²⁸ Dari ungkapan narasumber MA dapat dipahami bahwa KPI tetap dipertahankan meskipun lepas dari program LK3 dan tidak mendapat

²⁸ MA, "Ketua KPI."

penyokong dari lembaga lain, KPI tetap berdiri sendiri melalui Swadaya dengan mengandalkan kekuatan dalam dari anggota yang memanfaatkan keberagaman dan relasi. Namun swadaya juga menjadi hambatan, khususnya berdampak pada pendanaan dan manajemen organisasi.

Dalam pendanaan, KPI bergantung pada dana anggota dari arisan atau hasil warung yang tidak menentu, narasumber AB mengutarakan:

“Keuangan itu yang karena suka rela, kalau ada kegiatan kita yang urunan, kalau ada sisa di sisihkan untuk konsumsi. Tidak semuanya ikut arisan, tapi semua anggota, kan tidak mungkin yang arisan menyediakan kita kan gabungan, kalau ada dananya tidak ada sih mengeluarkan banyak dana dalam kegiatan tapi, arisan itu biasanya untuk kas, biasanya ada juga yang nyumbang kalau ada keperluan.”²⁹

Tanpa dukungan pendanaan yang tetap dari donor atau pemerintah, gerakan ini sangat bergantung pada militansi individu anggotanya. Keterbatasan modal untuk mengembangkan “Kios KPI” juga menghambat percepatan kemandirian ekonomi komunitas secara lebih luas. Narasumber MN menjelaskan:

“Kita ada kios nya disitu dana nya darimana? Dari anggota, swadaya memberikan ada yang donasi ada yang apa namanya saham ya itu ada beberapa ibu-ibu, kemudian dikembangkan siapa yang membeli dari anggota kemudian dari warga sekitar.”³⁰

Berdasarkan pernyataan narasumber menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan komunitas dibangun melalui prinsip swadaya, partisipasi bersama, dan solidaritas ekonomi antaranggota. Narasumber menjelaskan bahwa sumber pendanaan kios atau usaha komunitas tidak bergantung pada bantuan eksternal, melainkan berasal dari kontribusi anggota sendiri, baik dalam bentuk donasi

²⁹ AB, “Anggota KPI beragama Protestan.”

³⁰ MN, “Sekretaris KPI.”

maupun penyertaan modal yang disebut sebagai “saham” oleh beberapa anggota. Hal ini menggambarkan adanya rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan komunitas. Ketergantungan KPI terhadap sistem swadaya menunjukkan kuatnya solidaritas internal, namun di sisi lain menyebabkan lemahnya stabilitas organisasi karena keberlangsungan program sangat bergantung pada komitmen personal anggota.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Perempuan pada Komunitas Perempuan *Interfaith* dalam Membangun Harmoni Antaragama di Banjarmasin

Peran perempuan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu peran tidak langsung dan peran langsung. Peran tidak langsung merujuk pada tindakan perempuan yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung, sehingga dampaknya sulit dirasakan secara langsung. Sebaliknya, peran langsung mengacu pada partisipasi aktif perempuan yang menghasilkan dampak dan pengaruh yang jelas dalam kehidupan masyarakat.³¹

Menurut penelitian, kontribusi perempuan dalam Komunitas Perempuan *Interfaith* (KPI) lebih terlihat jelas dalam bentuk peran langsung. Ini terlihat dari partisipasi aktif perempuan dari berbagai agama dalam banyak kegiatan komunitas, seperti dialog antar agama, kegiatan sosial, pelatihan, dan forum diskusi untuk membangun hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. Keterlibatan ini

³¹ Zuraidah, “Peran Perempuan dalam Membangun Masyarakat Religius di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Sosial Budaya*, 10, no. 01 (Juni 2013).

menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya ada sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam membangun ruang toleransi dan kerja sama antar agama di masyarakat.

Peran ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran adalah aspek yang dinamis dari suatu posisi. Seseorang dianggap menjalankan peran ketika ia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.³² Dalam konteks ini, perempuan di KPI menjalankan perannya dengan berpartisipasi aktif di ruang publik sebagai agen perdamaian dan harmoni antaragama. Perempuan di KPI tidak hanya berstatus sebagai anggota komunitas, tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang konkret dalam memperkuat toleransi, membangun komunikasi lintas agama, dan mengurangi prasangka antar agama di dalam masyarakat.

Untuk menganalisis temuan penelitian ini, digunakan teori peran dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Menurut Soekanto, peran mencakup tiga dimensi yang saling terkait: *pertama*, norma-norma yang melekat pada kedudukan seseorang dalam masyarakat; *kedua*, konsepsi tentang tindakan yang dapat dilakukan seseorang sesuai dengan posisinya dalam organisasi atau masyarakat; dan *ketiga*, perilaku individu yang memiliki arti penting bagi struktur sosial masyarakat. Ketiga dimensi ini tidak bersifat eksklusif, melainkan bekerja secara simultan dalam setiap tindakan sosial individu.

³² Lantaeda dkk., "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon.", 2.

Dalam konteks penelitian ini, tiga peran empiris yang ditemukan di lapangan yakni advokat perdamaian, fasilitator dialog, dan jembatan antaragama, bukanlah terjemahan langsung dari masing-masing dimensi Soekanto secara terpisah. Sebaliknya, ketiga peran tersebut dianalisis secara bersamaan menggunakan ketiga dimensi tersebut. Artinya, setiap peran yang dijalankan oleh perempuan anggota Komunitas Perempuan Indonesia (KPI) dapat dikaji dari aspek norma yang melandasinya, perilaku yang diharapkan dari posisi mereka sebagai anggota komunitas, serta fungsi sosial yang mereka jalankan dalam struktur masyarakat multireligius di Banjarmasin.

Peran sebagai advokat perdamaian mencerminkan pelaksanaan norma-norma sosial yang mendorong toleransi dan perdamaian. Peran ini sekaligus menunjukkan komitmen perempuan KPI terhadap nilai-nilai kemanusiaan lintas agama serta fungsi mereka sebagai penggerak perubahan di ruang publik. Sementara itu, peran fasilitator dialog merefleksikan upaya perempuan KPI dalam menciptakan ruang komunikasi lintas agama yang berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati. Melalui peran ini, mereka turut menjaga kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Adapun peran sebagai jembatan antaragama menunjukkan fungsi perempuan KPI dalam menghubungkan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Peran tersebut diwujudkan melalui pembangunan jaringan dan relasi lintas institusi keagamaan yang didasari semangat solidaritas.

Adapun peran sebagai jembatan antaragama mencerminkan fungsi sosial perempuan dalam menghubungkan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Peran tersebut diwujudkan melalui pembangunan jaringan dan relasi lintas institusi

keagamaan yang didasari oleh norma solidaritas dan saling pengertian. , teori peran Soerjono Soekanto berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami kompleksitas peran perempuan KPI secara lebih mendalam, bukan sekadar sebagai alat kategorisasi. Melalui berbagai peran yang dijalankan, perempuan KPI tidak hanya menjadi anggota komunitas, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat toleransi, membangun komunikasi lintas agama, serta mengurangi prasangka antaragama di masyarakat.

Berdasarkan data penelitian, perempuan dalam KPI Banjarmasin menunjukkan bahwa ajaran agama tidak selalu menjadi penghambat keterlibatan perempuan di ruang publik. Justru, perempuan dari berbagai latar belakang agama memaknai nilai-nilai agamanya sebagai landasan untuk membangun perdamaian, toleransi, dan harmoni antaragama. Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara nilai keagamaan dan praktik sosial perempuan dalam komunitas antaragama. Hubungan harmonis dapat tercipta ketika masyarakat mampu membangun komunikasi, kerja sama, sikap saling menghargai, dan mengurangi prasangka antar kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, kelima kegiatan KPI dapat dipahami sebagai bentuk praktik nyata dalam menciptakan integrasi sosial di tengah masyarakat multireligius.

Secara keseluruhan, kelima kegiatan KPI saling berkaitan dalam membangun harmoni antaragama di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin. Dalam perspektif teori harmoni antaragama, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses komunikasi, interaksi sosial, kerja sama, serta pengurangan prasangka yang dilakukan secara

berkelanjutan. Kehadiran perempuan dalam KPI memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi peserta dalam kegiatan lintas agama, tetapi juga berperan sebagai agen perdamaian yang aktif dalam membangun ruang sosial yang inklusif, toleran, dan humanis di tengah masyarakat multireligius.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa kontribusi perempuan dalam KPI Kalimantan Selatan dapat dikategorikan ke dalam tiga peran utama.

Kategorisasi ini dihasilkan dari proses koding tematik terhadap pola-pola yang berulang dalam data, di mana aktivitas perempuan secara konsisten menunjukkan tiga fungsi yang berbeda namun saling melengkapi: memperjuangkan nilai-nilai perdamaian di ruang publik (advokasi), menciptakan dan mengelola ruang dialog yang inklusif (fasilitasi), dan mempertemukan komunitas-komunitas yang berbeda iman dalam satu jejaring sosial (penjembatanan). Ketiga peran ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling menopang dalam satu gerakan kolektif perempuan antaragama yang berakar pada nilai kesetaraan dan kemanusiaan.

a. Perempuan sebagai Advokat Perdamaian

Peran ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KPI, seperti dialog antaragama, kegiatan sosial bersama, sesi refleksi, hingga ruang untuk berbagi pengalaman di antara anggota komunitas. Mereka tidak hanya menerapkan secara teoritis melalui edukasi lewat seminar, webinar, maupun dialog publik, akan tetapi mereka melakukan aksi langsung secara praktis seperti aksi sosial terkait isu kemanusiaan kepada masyarakat umum. Lewat aktivitas ini,

perempuan berusaha mengurangi prasangka dan membangun rasa pengertian di antara masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Peran ini sejalan dengan pandangan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam membangun komunikasi, menanamkan nilai-nilai toleransi, dan memperkuat hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Karakter kepedulian, empati, serta kemampuan membangun relasi sosial menjadikan perempuan aktor yang strategis dalam upaya menciptakan harmoni antaragama di masyarakat.

Peran perempuan KPI sebagai advokat perdamaian juga sejalan dengan pandangan Luh Riniti Rahayu dan Putu Surya Wedra Lesmana yang menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia melalui karakter yang adaptif dan komunikatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota KPI tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta, tetapi juga berperan sebagai penyelenggara, narasumber, dan penyebar nilai-nilai perdamaian melalui berbagai kegiatan lintas agama.

b. Perempuan sebagai fasilitator dialog antaragama

Dialog publik yang dijalankan KPI menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam membangun komunitas lintas agama. Peran ini tercermin melalui berbagai kegiatan, seperti dialog publik, belajar bersama, diskusi tempat ibadah, dan refleksi bersama yang memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka mengenai keberagaman secara terbuka tanpa memandang latar belakang agama. Kehadiran ruang dialog tersebut menciptakan suasana yang inklusif sehingga setiap anggota merasa diterima dan

dihargai. Dialog yang dibangun tidak hanya berlangsung dalam forum formal, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari dan kegiatan bersama.

Dalam konteks ini, perempuan KPI berperan sebagai fasilitator dialog yang menjembatani komunikasi antaragama. Mereka tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta, tetapi juga aktif menjaga jalannya diskusi, menciptakan suasana yang nyaman, serta membangun interaksi yang inklusif. Peran tersebut tampak dalam upaya menjaga komunikasi tetap kondusif dan mengurangi kecurigaan antarkelompok agama. Keterlibatan perempuan dalam dialog lintas agama menunjukkan kemampuannya membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan menghargai perbedaan. Pendekatan yang mengedepankan kepedulian dan kebersamaan menjadikan perempuan berperan penting dalam memperkuat toleransi dan harmoni sosial keagamaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan KPI tidak sekadar menjadi peserta dialog, melainkan turut menciptakan ruang yang aman dan inklusif. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber MN, perempuan dinilai lebih luwes dan empatik sehingga efektif dalam meredakan potensi konflik berbasis agama di tingkat akar rumput. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohmawati yang menunjukkan bahwa perempuan dalam forum dialog antaragama di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. Selain itu, pandangan Sori bahwa harmoni tidak tercipta secara otomatis, melainkan melalui interaksi sosial yang aktif dan timbal balik, juga tercermin dalam berbagai kegiatan

KPI yang memungkinkan anggotanya saling mengenal, memahami perbedaan, dan membangun hubungan yang inklusif.³³

c. Perempuan sebagai Jembatan Toleransi Antaragama di Banjarmasin

Perempuan anggota KPI berperan sebagai jembatan toleransi antaragama di Banjarmasin. Peran ini terlihat dari kemampuan mereka mempertemukan individu dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam dalam ruang yang inklusif. Kehadiran KPI menjadi sarana bagi perempuan lintas agama untuk membangun solidaritas sosial tanpa memandang perbedaan keyakinan. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari percakapan sehari-hari hingga seminar, webinar, dan program lintas agama lainnya yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Perempuan di KPI mampu mengurasi kecurigaan di tengah komunitas, hal ini menumbuhkan dan memperkuat rasa saling menghargai. Hilangnya sikap saling curiga menimbulkan kepercayaan, dengan keberagaman mereka dari tiap agama dan aliran menjadi penghubung sosial pagi antaragama.

Melalui Kegiatan bersama dalam berbagai rangkaian kegiatan yang telah dijalankan, seperti seminar, webinar, dialog publik, kunjungan tempat ibadah, aksi sosial maupun kios KPI. Dari kegiatan inilah mereka membangun kerja sama sosial, kerja sama ini terbangun karena keberagaman di komunitas yang menghubungkan mereka ke tokoh agama, pemerintah, dan lembaga-lembaga tertentu sehingga menumbuhkan interaksi lintas agama dan budaya. Peran yang mereka jalankan

³³ Muhammad Khoiruzzadi dan Lia Dwi Tresnani, "Harmonisasi Masyarakat Muslim dan Kristen: Pola Interaksi Bermasyarakat Dukuh Purbo," *Jurnal Harmoni* 21, no. 1, 135.

sebagai relasi sosial mengurangi kecurigaan dan membangun rasa saling percaya tanpa memandang latar belakang budaya dan agama mereka.

Hal ini sejalan bahwa harmoni dapat tercipta jika interaksi atau hubungan antar kelompok atau individu dalam masyarakat antara satu dengan yang lain terjalin dengan baik, menghargai perbedaan, merasa saling membutuhkan, terbangun kerjasama, tolong menolong dan sebagainya maka masyarakat tersebut dikatakan harmonis.³⁴ Maka dapat dikatakan jembatan atau relasi dalam KPI merupakan salah satu strategis perempuan untuk Peran tersebut berkontribusi dalam membangun harmoni antaragama melalui pendekatan yang mengedepankan empati, kepedulian, dan sikap inklusif, sehingga mampu mengurangi prasangka serta memperkuat hubungan antarpemeluk agama.

Peran perempuan KPI sebagai jembatan antaragama dapat dipahami melalui teori harmoni antaragama yang memandang harmoni bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan penghormatan aktif terhadap perbedaan serta upaya membangun hubungan yang positif antar pemeluk agama. Keberagaman anggota KPI yang berasal dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, serta kelompok Ahmadiyah dan Syiah menjadikan komunitas ini sebagai representasi masyarakat multireligius yang memungkinkan terjalinnya interaksi lintas agama secara langsung.

Melalui kunjungan tempat ibadah secara bergantian dari sekretariat Muslim, Gereja, Vihara, hingga Pura perempuan KPI tidak hanya membangun relasi dengan

³⁴ Djefrin Zulukha dan Apriliana Lase, "Harmoni Multikultural: Budaya Dalam Dinamika Sosial Kontemporer Masyarakat Tarutung," *Uli Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 6 (2024): 164–69, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i6.3526>.

pengurus dan tokoh agama, tetapi juga mengikis prasangka yang selama ini terbentuk dari ketidaktahuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wirata bahwa harmoni dapat tercipta ketika suatu kelompok menekankan pentingnya menghilangkan prasangka negatif antar kelompok beragama melalui dialog yang saling menghormati. Dengan demikian, jembatan yang dibangun perempuan KPI bersifat struktural sekaligus personal, menghubungkan institusi keagamaan di satu sisi, dan mempertemukan hati antarindividu di sisi lain.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Perempuan dalam Membangun Harmoni Antaragama

a. Faktor Pendukung

Pertama, keberagaman latar belakang anggota KPI yang menjadikan faktor pendukung peran mereka dalam menjalankan strategis. KPI memuat keberagaman agama dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha di tambah dengan hadirnya anggota dari berbagai aliran seperti Ahmadiyah, Syiah dan aliran tiap agama lainnya. Di sisi lain keanggotaan KPI memuat beragam profesi dari ibu rumah tangga, guru, dosen, profesor, aktivis organisasi agama, dan pelaku usaha kecil. Melihat latar belakang beragam mereka dari agama, aliran dan profesi hingga masing-masing membawa pengalaman mereka.

Keberagaman anggota menjadi faktor pendukung karena dengan berbagai latar belakang mereka menciptakan ruang pertemuan antaragama, memperluas wawasan akan keberagaman, membangun pemahaman antaragama, serta mengurangi stereotif dan prasangka tiap anggota. Dengan berbagai alasan tersebut faktor keberagaman latar belakang menciptakan ruang pertemuan lintas aman

yang aman, memperluas wawasan keberagaman, membangun pemahaman antaragama, maupun mengurangi stereotif dan prasangka.

Dalam konteks ini keberagaman menjadi salah satu kunci yang memperkuat relasi sosial antaranggota KPI. Interaksi antaragama yang berlangsung ketika duduk dan saling mengenal yang intensif mampu mengurangi prasangka dan stereotif kepada kelompok lain khususnya minoritas. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Wirata bahwa harmoni dapat tercipta ketika suatu kelompok menekankan pentingnya menghilangkan prasangka negatif antar kelompok beragama.³⁵ Peran para pemuka agama juga krusial melalui dialog yang saling menghormati untuk memimpin masyarakat menuju kerukunan. Dengan begitu anggota komunitas menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan mampu membangun hubungan sosial yang lebih harmonis selama prosesnya berlangsung.

Hal ini sejalan dengan teori harmoni antaragama yang menyatakan bahwa interaksi dan dialog agama diperlukan untuk menciptakan hubungan sosial yang damai dan toleran. Lewat komunikasi dan dialog yang terbuka yang dikelola melalui keberagaman dapat membantu membangun sikap saling menghargai di tengah masyarakat multikultural.

Kedua, relasi dan jejaring sosial yang merupakan bentuk faktor pendukung yang paling terlihat. KPI merupakan komunitas swadaya yang berdiri sendiri tanpa bantuan lembaga resmi, KPI adalah wadah bagi lembaga ketika pihak luar ingin berkolaborasi dengan perempuan-perempuan berbagai antaragama di Banjarmasin. Maka dari itu dalam merancang dan melaksanakan strategis KPI lebih

³⁵ Zulukha dan Lase, "Harmoni Multikultural.", 135.

memanfaatkan jaringan atau relasi sosial, perempuan dengan keberagaman latar belakang menjalin relasi dengan tokoh agama, pemerintah dan bekerja sama dengan lembaga sosial dalam tiap kegiatan.

Jaringan dan relasi mendukung untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan, memperluas ruang lingkup dialog, dan memperkuat kerja sama lintas agama. Dengan begitu relasi dan jaringan berfungsi memperkuat solidaritas sosial, membangun rasa saling percaya, sekaligus mempererat hubungan antaragama.

Hal ini sejalan dengan hasil temuan dari Haryani dan Saputro, dalam mencegah konflik keagamaan perempuan lebih condong ke pendekatan keberlanjutan sosial dan resolusi konflik yang berorientasi pada relasi.³⁶ KPI berusaha meminalisir konflik melalui kerja sama antaragama maupun antaragama, dengan bekerja sama dalam mempromosikan kedamaian KPI menunjukkan identitas mereka sebagai komunitas gender yang berbasis anti konflik. Demikian dua faktor besar pendukung peran perempuan pada KPI dalam membangun harmoni antaragama, kedua saling terhubung satu sama lain. Dalam menjalin jaringan dan relasi ke eksternal KPI, KPI memanfaatkan dengan baik keberagaman latar belakang tiap anggota.

b. Faktor penghambat

Di tengah keterlibatan mereka dalam KPI, para perempuan juga tidak lepas dari tuntutan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Selain aktif di komunitas, mereka tetap menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, istri, atau

³⁶ Elma Haryani dan M. Endy Saputro, "Women's Agency in Resolving Religious Conflict in Indonesia: A Gender-Based Literature Review," *Smart; Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 5, no. 1 (2025): 46.

pekerja. Kondisi ini memaksa mereka untuk lebih pandai dalam membagi waktu dan tanggung jawab antara kegiatan sosial dan kewajiban keluarga. Alhasil, partisipasi anggota dalam kegiatan komunitas kerap tidak stabil naik turun mengikuti kebutuhan domestik dan pekerjaan pribadi yang harus diprioritaskan. Solidaritas yang tidak selaras dan pergantian masuk anggota merupakan efek dari peran ganda yang ada pada KPI, hal ini berdampak kurangnya keselarasan untuk membangun harmoni antaragama.

Seperti yang telah diuraikan oleh Nadirah, perempuan sesungguhnya tidak hanya terikat pada peran domestik di keluarga, melainkan juga memiliki peran sosial di ruang publik. Mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.³⁷ Hal ini selaras dengan teori peran Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam masyarakat. Karena seseorang dapat memiliki lebih dari satu status sosial, ia pun harus menjalankan berbagai tuntutan peran secara bersamaan.³⁸ Dalam situasi tertentu, tumpukan tuntutan ini dapat memicu benturan peran, terutama ketika kewajiban domestik berbenturan dengan aktivitas sosial perempuan di ruang publik.

Meskipun perempuan memiliki potensi besar dalam membangun harmoni sosial dan antaragama, keterlibatan mereka dalam organisasi *interfaith* masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa peran ganda

³⁷ Bainar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan* (Pustaka Cidesindo, 1998), 45.

³⁸ Syaron Brigitte Lantaeda dkk., "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/17575>, 2.

perempuan, keterbatasan waktu, minimnya dukungan keluarga, stereotip gender, hingga lemahnya manajemen organisasi komunitas. Dalam organisasi berbasis komunitas, keterbatasan sumber daya manusia dan pembagian kerja yang belum optimal juga dapat memengaruhi efektivitas peran perempuan dalam menjalankan program-program sosial dan dialog antaragama.